

TAJUK RENCANA

Menjaga Marwah Lembaga Peradilan

PENANGKAPAN terdakwa Gregorius Ronald Tannur oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat apresiasi pelbagai pihak. Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, ditangkap di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (27/10).

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan vonis MA yang menghukumnya lima tahun penjara. MA menggubulkan kasasi jaksa yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan terdakwa.

Berkecenderungan itu, tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun oleh Komisi Yudisial atas pelanggaran etik berat. Tak hanya itu, ketiga hakim tersebut, yakni Erntuuh Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul telah ditangkap Kejagung atas dugaan menerima suap dalam pembebasan Ronald Tannur. Bahkan, dalam perkembangannya, suap tersebut juga melibatkan mantan pejabat MA, Zarof Ricar. Mereka telah resmi dijadikan tersangka.

Kasus hakim menerima suap menjadi ironi di tengah tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Apalagi, Presiden sudah menekan SK kenaikan gaji tersebut. Maka, pertanyaan klasik yang masih relevan diajukan, apakah kenaikan gaji maupun tunjangan hakim menjamin mereka profesional dan tidak mempan disuap?

Lagi-lagi jawabnya tergantung mentalitas hakim bersangkutan. Sekaligus ini mengingatkan kita kepada pernyataan Wakil Presiden RI pertama Moh Hatta bahwa sebaik apapun aturan dibuat, bila mental yang berwenang bejat, maka tidak ada artinya.

Tentu kita tak hendak mengatakan bahwa kenaikan gaji atau tunjangan hakim tidak perlu, melainkan hanya ingin mengingatkan

bahwa gaji tinggi tidak menjamin hakim profesional, bertindak independen dan kebal suap. Sebab, pada akhirnya semua tergantung pada mentalitas aparaturnya sebagaimana diingatkan Hatta.

Kita juga ingin mengingatkan, peningkatan kesejahteraan hakim berupa kenaikan gaji maupun tunjangan harus dibarengi dengan pembinaan mental, serta pengawasan yang ketat, baik secara internal maupun eksternal. Pembinaan mental itu harus dimulai sejak rekrutmen calon hakim, mereka harus mendapat pemahaman yang utuh tentang bagaimana menjaga marwah hakim dengan menghindari perbuatan-perbuatan tercela, seperti korupsi dan suap.

Mencermati kasus suap tiga hakim PN Surabaya yang berujung pembebasan terdakwa, perilaku tercela itu dilakukan tidak sendirian, melainkan melibatkan perantara, dalam hal ini mantan pejabat di MA, Zarof Ricar. Zarof Ricar hanya berperan sebagai perantara, yakni orang yang menghubungkan pihak berperkara ke MA. Lantas siapa orang MA yang telah dihubungi Zarof Ricar? Sejauh ini belum ada kejelasan. Namun telah ada keterangan dari Kejagung belum ada aliran suap ke MA.

Tanpa bermaksud mengabaikan pernyataan tersebut, kita mengharapkan agar kasus suap tiga hakim ini diungkap secara menyeluruh dan transparan. Inilah saatnya untuk bersih-bersih lembaga peradilan, termasuk MA. Marwah MA harus kita jaga, sehingga masyarakat percaya bahwa puncak peradilan ini benar-benar bisa menjadi tumpuan terakhir masyarakat memperoleh keadilan. Boleh jadi, masih ada terduga lain yang terlibat dalam kasus suap tiga hakim PN Surabaya. Kita masih menunggu kerja-kerja profesional Kejagung.

□ - d

Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo

Masduki

PERISTIWA pembubaran diskusi sejumlah aktivis publik Forum Tanah Air di Kemang Jakarta dan pembatasan area pada sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa menjadi warna lain satu bulan menjelang pelantikan Prabowo sebagai presiden 20 Oktober 2024 lalu. Peristiwa ini tidak mengejutkan tetapi semakin mengkhawatirkan. Peristiwa tersebut memberi isyarat munculnya dua hal. Pertama, masih kuatnya penggunaan 'kekerasan fisik' terhadap ekspresi masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Kedua, upaya mengutamakan 'stabilitas politik' dan tertib sosial dengan meredam kebebasan berbicara (apapun alasan dan siapapun pelakunya) demi kelancaran seremoni pelantikan pejabat.

Nah, bagaimana nasib kebebasan berekspresi ini di era Presiden Prabowo dan dalam lanskap politik digital yang semakin menggurita?

Empat Komponen

Dalam tradisi demokrasi klasik ketika retorika menjadi praktek komunikasi dominan, kebebasan berekspresi dipahami sebatas bebas berbicara di ruang publik. Adalah Plato dan Aristoteles mempraktekkan orasi di lapangan terbuka di kota Aten, Yunani, ketika media massa konvensional dan digital belum ada. Di Indonesia, kultur politik yang feodalistik ketika kepatuhan kepada pemegang otoritas menandai loyalitas ke negara, kebebasan warga negara menyatakan tidak (*no*) di ruang terbuka terhambat. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, kebebasan mengimplikasikan kritik cenderung langka, terutama bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di perguruan tinggi. Mundur ketimbang era Yunani.

Ketika datang era teknologi digital, kebebasan berekspresi diharapkan mengemuka, namun para analis teknologi kritis menemukan fenomena terbalik. Muncul represi yang kuat dalam bentuk baru bernama *digital surveillance* (pemantauan perilaku aktivis sosial di media sosial mereka). Akun digital aktivis akan diretas atau minimal mengalami *take down*. Dalam bentuk lain yang halus, postingan mengandung kritik akan diserang secara

brutal oleh buzzer atau infleuencer politik sebagai tentara digital bayaran.

Lebih lanjut, ruang digital yang dihuni jutaan netizen dengan beragam laku dan kepentingan juga mengancam kualitas informasi sebagai bahan baku kebebasan berekspresi. Selain data pribadi yang tidak aman, informasi yang tersedia mengalami blur (meminjam Bill Kovach). Tidak jelas mana informasi dan disinformasi, mana data



KR-JOKO SANTOSO

faktual mana data fabrikasi. Kultur bebas 'berkicau' memicu *hate speech* dan polarisasi sosial.

Dalam situasi ruang media sosial atau aplikasi digital terfragmentasi, menjadi politis maka lahir tindakan bungkam atau *spiral of silent*, suatu *self-censorship* yang menggerus hak warga negara. Sepanjang 10 tahun Jokowi, represi yang bertingkat, berlipis melibatkan buzzer menyebabkan krisis pada kegiatan jurnalistik. Aliansi Jurnalis Independen mencatat tahun 2023 ada 38 kasus kekeerasan digital terhadap jurnalis di Indonesia. Risiko lebih lanjut adalah lemahnya *counter culture* seperti kita lihat pada aksi para guru besar yang sepi ketika merespons pratek politik di-nasti menjelang Pilpres yang lalu.

Dari penjelasan di atas, kebebasan

berekspresi di era Prabowo jauh lebih kompleks, ia menyangkut empat komponen yang saling berkait, yaitu kebebasan dasar menyuarakan sikap berbeda, adanya jaminan keberadaan media atau ruang ekspresi yang bebas represi, jaminan keamanan atas data pribadi dan ketersediaan atau kenyamanan akses informasi di platform digital sebagai sembako komunikasi demokratik.

Memasuki tahun pertama masa kerja Prabowo, mengembalikan hak warga untuk bebas berpendapat dalam empat komponen di atas penting agar kualitas komunikasi politik terjaga. Kualitas informasi sebagai bahan baku kebijakan membutuhkan dialektika Hegel: tes, antitesa sintesa dalam budaya komunikasi yang egalitarian.

Dengan latarbelakang militer yang sangat disiplin, satu komando, loyal kepada atasan, maka nasib kebebasan berekspresi yang berkebalikan dengan militerisme di tangan Prabowo Subianto secara teoritis tampak suram. Gerakan pembubaran diskusi, aksi demo mahasiswa yang disertai serangan digital peretasan, dll atas akun media sosial berisi pendapat berbeda menjadi isyarat arah ini. Nah, apakah Prabowo berkomitmen melanjutkan gaya pemerintahan

Jokowi yang populis represi? Waktu yang akan membuktikannya. (*)-d

*)**Masduki**, Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Inisiator Forum Cik Ditiro.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6846.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE, MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Wijono Putro, Surya Adi Lesmana. **Graphics:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Yogyakarta, 55232, Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232, Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Apa yang Kau Berikan untuk Negara?

Warisman

DI negerinya Pak Lik/Paman/*Uncle Sam* ada ungkapan, kurang lebihnya berbunyi: "Jangan tanya apa yang kamu terima dari negara, tapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara." Kurang jelas apakah ungkapan itu dipraktikkan atau hanya sekadar ungkapan, yang konon pernah dilontarkan oleh salah seorang presidennya.

Tetapi kenyataannya Amerika Serikat yang penduduknya multiras itu berhasil menjadi negara adidaya, militer maupun perekonomiannya. Bahkan hanya menyebut Amerika saja orang sudah tahu yang dimaksud Amerika Serikat. Padahal benua Amerika dari utara sampai selatan, terdiri dari berbagai negara. Mungkin karena negara lain di benua itu tidak menggunakan nama Amerika.

Indonesia

Ungkapan di atas memang di Amerika sana, bukan di negara kita Indonesia tercinta. Dua negara yang berbeda, tetapi di samping perbedaan, kalau dicari persamaannya, juga ada. Amerika wilayahnya luas, Indonesia juga luas. Amerika multiras Indonesia juga berpenduduk dari berbagai suku. Sama-sama negara dengan jumlah penduduknya banyak, dan sama-sama berada di tepi Samudera Pasifik.

Jarak jengangnya dalam hal kemajuan, Indonesia - Amerika Serikat memang jauh. Tetapi bukan hal yang mustahil untuk memperpendek jarak. Orang Indonesia ada yang meniru gaya hidup orang Amerika. Mestinya juga bisa meniru cara berpikir majunya orang Amerika. Kalau bisa meniru gaya hidup orang Amerika tentunya juga bisa mempraktikkan ungkapan orang Amerika, apa yang sudah kamu berikan kepada negara.

Pemimpin

Setelah pelantikan, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan, semua diawali dari para pemimpinnya. Pejabat memberi contoh yang baik, menjadi teladan. *Ing ngarsa sung tuladha*. Maka apa yang dicita-citakan Kabinet Merah Putih akan terwujud. Indonesia maju rak-

yatnya sejahtera.

Seluruh rakyat Indonesia berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran dengan kabinet Merah Putihnya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Bukan tugas ringan dalam situasi global yang sedang tidak baik-baik saja. Berbekal keyakinan, semua akan menjadi sesuai dengan yang diharapkan.

Kesempatan menjadi pemimpin berarti mendapat sesuatu yang lebih baik dari negara, dibanding yang tidak menjadi pemimpin. Maka perlu bertanya kepada diri sendiri apa yang sudah diberikan kepada negara. Jika pemimpinnya bisa memberi teladan, tentu rakyat akan mengikuti jejaknya.

Berburu kedudukan adalah gear mempunyai kekuasaan, mengatur, menentukan langkah yang kemudian diikuti semua pihak. Berbekal pemikiran untuk membenahi yang belum baik, dan melanjutkan yang sudah baik.

Maka karena mendapat kekuasaan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk bidang yang dikuasainya. Memperbaikinya, memajukan negara dan menyejahterakan rakyatnya. Berbuat demi negara, bukan demi diri sendiri dan kroni-kroninya. Itu juga disinggung oleh Presiden Prabowo.

Presiden juga mengingatkan agar partai politik tidak menugasi kadernya yang menjadi menteri untuk mencari penghasilan partainya dari APBN. Mestinya berlaku pula bagi pejabat daerah dengan APBDnya. Sebagai kader partai tentu akan merasa tidak nyaman apabila kedudukannya tidak memberikan keuntungan bagi partainya. Maka perlu

komitmen yang kuat untuk berani mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya.

Seperti kata pepatah, semakin tinggi suatu pohon, maka semakin besar angin yang menerpanya. Jika tidak kuat akan patah ranting dan dahannya. Bahkan bisa kemudian tumbang karena akarnya tidak mampu menahan kuatnya terpaan angin.

Semakin tinggi jabatan, tekanan kepentingan pihak lain juga makin tinggi. Tetapi presiden ketika memilih seseorang untuk menempati pos tugasnya tentu sudah melalui pertimbangan masak. Percaya mereka betul-betul bisa bekerja dan untuk kepentingan negara, menyejahterakan rakyatnya. Dengan begitu, rakyat pasti akan mendukungnya. Rakyat akan menirunya memberikan sesuatu kepada negara. Patuh, taat aturan, mendukung semua program pemerintah.

Rakyat menaruh harapan besar kepada pemerintah yang baru, untuk membawa Indonesia lebih maju lebih baik lagi. Membawa keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga.***-d

*)**Warisman**, wartawan SKH Kedaulatan Rakyat.

Pojok KR

Ronald Tannur ditangkap di Surabaya.
- **Apresiasi tinggi kepada Kejagung.**

Penangkapan tiga hakim cederai rasa keadilan.
- **Padahal gaji hakim sudah dinaikkan.**

Survei Indikator, 85 persen yakin Prabowo lebih baik.
- **Saatnya membuktikan.**

Berita